

MAKALAH

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati,M.Pd.
2. Fiarika Dwi Utari,S.Pd.,M.Pd.



Disusun Oleh Kelompok 2:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Saqila Rahma Andini | 2313031020 |
| 2. Tria Meilisma | 2313031029 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Akuntansi Manajemen Sektor Publik” dengan tepat waktu. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

Dalam penyusunan makalah ini, kami mendapatkan banyak bantuan bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Pujiati, M.Pd. dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan arahan dan bimbingan, dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan makalah ini di masa mendatang. Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman mengenai Akuntansi Manajemen Sektor Publik.

Bandar Lampung, 5 September 2025

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	1
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik.....	3
2.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	4
2.3 Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik	5
2.4 Pengendalian Manajemen Sektor Publik	7
2.5 Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik	8
BAB III PENUTUP	10
3.1 Kesimpulan.....	10
3.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11
STUDI KASUS.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan transparansi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks ini, akuntansi manajemen sektor publik berperan penting dalam membantu manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengambil keputusan yang tepat sasaran. Berbeda dengan sektor swasta yang fokus pada keuntungan, sektor publik lebih menekankan pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian tujuan sosial. Karena itu, sistem informasi akuntansi yang digunakan harus mampu menyajikan informasi yang tepat dan bisa dipercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Akuntansi manajemen sektor publik tidak hanya memberikan data keuangan, tetapi juga membantu dalam perencanaan strategis, penganggaran, penilaian investasi, penentuan biaya layanan, serta penilaian kinerja.

Tujuannya adalah agar setiap keputusan yang diambil di lingkungan sektor publik dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan demikian, akuntansi manajemen menjadi alat penting dalam mendukung sistem akuntabilitas publik. Semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik, semakin penting peran akuntansi manajemen dalam sektor publik. Informasi yang dihasilkan dari sistem ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menyusun anggaran yang responsif, serta memastikan sumber daya digunakan secara optimal. Selain itu, akuntansi manajemen juga berperan dalam proses pengendalian, seperti pengendalian preventif, operasional, hingga evaluasi kinerja, agar kegiatan organisasi dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian akuntansi manajemen sektor publik
2. Apa tujuan akuntansi sektor publik
3. Apa peran akuntansi manajemen sektor publik
4. Apa pengendalian akuntansi manajemen sektor publik
5. Apa proses pengendalian akuntansi manajemen sektor publik

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian akuntansi manajemen sektor publik
2. Untuk mengetahui tujuan akuntansi sektor publik
3. Untuk mengetahui peran akuntansi manajemen sektor publik
4. Untuk mengetahui pengendalian akuntansi manajemen sektor publik

5. Untuk mengetahui proses pengendalian akuntansi manajemen sektor publik

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Menurut *Chartered Institute of Management Accountants* (CIMA) akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan pengendalian dalam suatu entitas dan untuk memastikan sesuai dan akuntabilitas penggunaan sumber daya tersebut. Selain itu, akuntansi manajemen sebagai profesi yang melibatkan kemitraan dalam pengambilan keputusan manajemen, penyusunan rencana dan sistem manajemen kinerja, penyediaan keahlian dalam pelaporan keuangan serta pengendalian untuk membantu manajemen dalam perumusan dan pelaksanaan strategi organisasi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen.

Akuntansi manajemen akuntansi publik adalah yang Mempelajari membuat informasi akuntansi yang relevan yang ditujukan pada pimpinan pada sektor publik, untuk perencanaan dan pengendalian. perencanaan diarahkan kepada hal yang bersifat strategik, pemberian informasi, penilaian investasi dan penganggaran, penentuan biaya pelayanan, penilaian kinerja. Serta pengendalian dijelaskan dalam bentuk pengukuran pencapaian kinerja manajemen dengan cara pencapaian target yang sesuai dengan program yang sudah direncanakan (Sujarweni, 2015:19). Tujuan dari perencanaan dan pengendalian tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai indikator dalam implementasi akuntansi manajemen sektor publik.

Aktivitas Akuntansi Manajemen Sektor Publik beberapa aktivitas dalam manajemen sektor publik relatif sama dengan yang digunakan pada organisasi swasta, antara lain: perencanaan, koordinasi berbagai bidang dalam organisasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, memotivasi orang-orang agar bekerja sesuai tujuan organisasi, fungsi pengendalian, bahkan sampai pada penilaian kerja. Dalam pelaksanaannya, akuntansi manajemen sektor publik memiliki 3 aktivitas, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam proses perencanaan merupakan level strategis maupun dalam level operasional dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan. Partisipasi dalam proses perencanaan meliputi beberapa hal, seperti penyusunan kebijakan, formulasi rencana dan konsep dasar penganggaran yang dinyatakan dalam satuan uang.

2. Inisiatif dan penyusunan tuntunan untuk pengambilan keputusan meliputi beberapa hal, seperti penentuan, analisis, presentasi dan interpretasi terhadap informasi yang relevan
3. Kontribusi dalam proses monitoring dan kontrol terhadap kinerja. Pemberian laporan berkala, baik organisasi secara keseluruhan maupun segmen yang ada. Laporan ini juga berisi komparasi antara target dengan realisasi anggaran.

2.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomi atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif atas program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (cost of services) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (charging for services). Sebagai contoh, untuk dapat menetapkan SPP per siswa, pemerintah harus dapat menghitung biaya pendidikan per siswa untuk tingkat pendidikan tertentu.

Dengan memperhitungkan semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proses pendidikan, pemerintah dapat menetapkan berapa SPP yang harus dibebankan kepada setiap siswa, berapa biaya ujian, dan biaya lainnya sehubungan dengan proses belajar-mengajar secara layak, wajar, dan rasional serta

berapa subsidi pendidikan yang harus diberikan. Dalam hal ini diperlukan akuntansi biaya di sektor publik untuk dapat menghitung total biaya sebagai dasar untuk pembebanan kepada publik atas pelayanan yang diberikan. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi.

Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran. Pada sektor publik, penganggaran merupakan tahap yang membutuhkan keahlian khusus karena penganggaran pada sektor publik merupakan proses politik, sehingga manajer sektor publik dituntut untuk memiliki political skill disamping pemahaman teknis akuntansi. Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator kinerja sektor publik.

Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintah, laporan rugi/laba dan aliran kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik hendaknya dipahami bukan sekedar akuntabilitas finansial saja, akan tetapi juga akuntabilitas value for money, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik.

2.3 Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengendalian tidak dapat dilakukan tanpa informasi yang memadai. Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik berperan dalam merencanakan strategi, memberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan dan tarif pelayanan serta penilaian kinerja.

1. Perencanaan Strategi

Pada tahapan perencanaan strategi, manajemen memberikan dan menyusun beberapa alternatif program yang dapat mendukung strategi yang efektif bagi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk

menentukan berapa biaya program (*cost of program*) dan biaya suatu aktivitas (*cost of activity*) sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang akurat, relevan, dan handal untuk menghitung besarnya biaya program, aktivitas, atau proyek. Akuntansi manajemen sektor publik sangat erat dengan proses pemilihan program, penentuan biaya, dan manfaat program serta penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi dihasilkannya anggaran sektor publik yang efektif, efisien, dan ekonomis (*value for money budget*).

2. Pemberian Informasi Biaya

Pada tahapan pemberian informasi biaya, informasi akuntansi manajemen hendaknya dapat mendeteksi sumber pemborosan yang masih berpotensi untuk diefisiensikan serta mencari metode atau teknik terbaik untuk menghemat biaya. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan finansial terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan *cost accounting* untuk pengambilan keputusan biaya.

3. Penilaian Investasi

Pada tahapan penilaian investasi ini untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Faktor yang harus diperhatikan akuntan manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian (*country risk dan political risk*), dan sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektivitas biaya (*cost-effectiveness analysis*). Penilaian investasi dengan menggunakan analisis efektivitas biaya menekankan seberapa besar dampak (*outcome*) yang dicapai dari suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu.

4. Penganggaran

Pada tahapan penganggaran akuntansi manajemen sektor publik diharapkan mampu berperan dalam memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang lebih efektif terkait dengan 3 fungsi anggaran antara lain alat alokasi sumber daya publik, distribusi, serta stabilitas

5. Penentuan Biaya Pelayanan dan Tarif Pelayanan

Pada tahapan penentuan biaya pelayanan dan tarif pelayanan, akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk

memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan.

6. Penilaian Kinerja

Pada tahapan penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

2.4 Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Akuntansi manajemen sektor publik memiliki kaitan erat dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen sektor publik sebagai pihak yang bertugas mengendalikan dan mengawasi organisasi agar mencapai tujuan dan menghindarkannya dari kesalahan atau kegagalan. Pengendalian manajemen sektor publik yang ada di Indonesia ini diterapkan dalam beberapa kelompok, diantaranya:

1. Pengendalian Preventif

Pengendalian dilakukan sebelum berjalannya proses manajemen sehingga meminimalisir kesalahan dan merencanakan strategi untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Pengendalian Operasional

Pengendalian ini merupakan waktu saat manajemen melakukan pengawasan terkait pelaksanaan atau operasional organisasi, yaitu dalam bentuk berjalannya program-program kerja yang disusun. Alat pengawasan pada pengendalian ini adalah anggaran yang dibuat di awal tahun kerja untuk setiap program kerja yang dibuat. Anggaran dana ini akan menjadi alat yang menghubungkan antara perencanaan dengan pengendalian.

3. Pengendalian Kinerja

Pada tahap ini jika program kerja sudah diselesaikan atau organisasi telah mencapai tahun akhir kerja, maka manajemen melakukan tipe pengendalian kinerja melalui penilaian program kerja dan bagaimana kinerja orang-orang dalam organisasi tersebut. Evaluasi terhadap kinerja tahun terkait bisa berdasarkan poin-poin yang sudah dicapai pada setiap program kerja yang sudah direncanakan dari awal atau dibandingkan dengan kinerja tahun lalu sebagai standarnya.

Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut (*follow-up*) untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai.

Namun sebaliknya, tanpa ada perencanaan maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Jones and Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi lima tahap, yaitu:

1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar
2. Perencanaan operasional
3. Penganggaran
4. Pengendalian dan pengukuran
5. Pelaporan, analisis dan umpan balik.

2.5 Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Proses pengendalian dilakukan dengan komunikasi secara formal dan informasi. dari sisi informasi, pengendalian ini bisa dengan komunikasi diskusi, rapat. sementara dari sisi formal pengendalian ini melalui serangkaian tahap yaitu perumusan strategi, perencanaan pembuatan anggaran, menjalankan dan menyelesaikan program kerja sesuai strategi dan evaluasi kinerja.

1. Perumusan Strategi

Fase ini merupakan waktu saat organisasi melakukan penentuan terhadap visi, misi, sasaran, tujuan, arah, serta segala kebijakan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab manajemen puncak. Jika organisasi pemerintahan proses perumusan strategi akan dilakukan oleh dewan legislative.

2. Perencanaan Strategi

Pada tahap selanjutnya adalah perencanaan yang merupakan proses pemantauan terhadap berbagai program kerja, aktivitas organisasi atau proyek-proyek yang di jalan kan. Tahap perencanaan strategi ini adalah proses dalam menentukan Tindakan implementasi terhadap strategi yang dibuat pada tahap sebelumnya.

3. Penganggaran

Tahap ketiga merupakan tahap yang cukup krusial. penganggaran merupakan tahap Dimana perencanaan secara keuangan terhadap segala program kerja atau aktivitas organisasi dibuat.

4. Operasional

Pada tahap operasional, tingkat manajemen hanya melakukan pengawasan berjalannya acara sesuai dengan rencana.

5. Evaluasi Kinerja

Tahap terakhir ini adalah tahap yang menilai kinerja operasional. Penilaian tersebut bisa dengan membandingkan hasil kinerja dengan poin- poin yang harus di capai atau dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Hasil evaluasi bisa menjadi standar untuk melakukan program kerja di tahun kerja mendatang.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Akuntansi manajemen sektor publik adalah sistem informasi yang digunakan untuk membantu pengelolaan organisasi sektor publik secara efektif, efisien, ekonomis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi penting dari akuntansi ini adalah dalam merencanakan, mengambil keputusan, membuat anggaran, mengontrol, hingga mengevaluasi kinerja. Tujuan utama dari akuntansi manajemen sektor publik adalah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam mengendalikan manajemen dan menjawab pertanggungjawaban kepada publik mengenai penggunaan sumber daya yang diberikan kepada organisasi sektor publik.

Dalam penerapannya, akuntansi manajemen sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat keuangan, tetapi juga sebagai alat strategis dalam menyusun kebijakan, menentukan biaya layanan, mengevaluasi investasi, serta mengukur kinerja. Selain itu, sistem pengendalian manajemen merupakan bagian yang penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Pengendalian ini mencakup pengendalian preventif, operasional, dan kinerja, semuanya terpadu dalam proses perencanaan dan pengendalian yang berkelanjutan.

3.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas akuntansi manajemen sektor publik, disarankan agar instansi pemerintah meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan akuntansi manajemen, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal dan pengembangan indikator kinerja yang relevan sangat penting dalam proses evaluasi. Informasi akuntansi juga harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, perencanaan anggaran, dan penilaian investasi. Setiap program publik sebaiknya berorientasi pada prinsip value for money agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Lakharis Inuzula, S. E., & CA, A. (2021). Akuntansi Manajemen Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*, 21.

Anggono, A. (2022). *Akuntansi manajemen pada entitas publik*. Penerbit Adab.

Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi sektor publik-edisi terbaru. Penerbit Andi.

STUDI KASUS

Evaluasi Pengendalian Manajemen di Dinas Pendidikan Kota Maju

Dinas Pendidikan Kota Maju pada tahun anggaran 2024 menerima alokasi dana sebesar Rp150 miliar dari APBD yang diperuntukkan bagi tiga program utama, yaitu: peningkatan kualitas guru, rehabilitasi sekolah rusak, dan subsidi pendidikan bagi siswa kurang mampu. Dalam pelaksanaannya, dinas tersebut berupaya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi manajemen sektor publik, termasuk dalam penyusunan anggaran dan evaluasi kinerja. Namun, hasil evaluasi di akhir tahun menunjukkan bahwa realisasi anggaran hanya mencapai 75% dari total yang direncanakan.

Beberapa program tidak selesai tepat waktu, dan beberapa bahkan tidak memiliki indikator kinerja yang jelas, terutama pada program subsidi pendidikan. Selain itu, laporan keuangan yang disusun hanya mencakup informasi finansial tanpa mencantumkan indikator non-finansial seperti dampak program terhadap peningkatan angka partisipasi siswa. Dinas Pendidikan juga belum menghitung biaya pelayanan per siswa secara akurat dan tidak menerapkan analisis efektivitas biaya dalam menilai kelayakan program-programnya. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perencanaan strategis, penganggaran, serta pengendalian manajerial, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan efisiensi dan akuntabilitas publik.

Pertanyaan:

1. Apa perbedaan utama antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sektor publik yang terlihat pada kasus ini?
2. Jelaskan bagaimana informasi akuntansi biaya dapat membantu Dinas Pendidikan dalam menentukan tarif subsidi pendidikan yang rasional dan adil. Sertakan contoh bagaimana biaya per siswa dapat dihitung dan digunakan dalam kebijakan.